



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar
Triwulan III Tahun



2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja berisi gambaran menyeluruh organisasi sekaligus berupa informasi mengenai target dan capaian hasil kinerja BPSPL Makassar, dalam hal ini capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Selain itu, laporan kinerja juga meliputi capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi program, serta tinjauan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.

diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Makassar diucapkan terima kasih

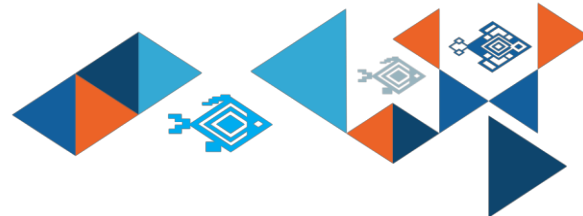
Maros, 14 Oktober 2025

**Kepala Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut
Makassar**



Ditandatangani
Secara Elektronik

A Muhammad Ishak Yusma



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik Triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2025 BPSPL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan Triwulan III tahun 2025. Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Triwulan III tahun 2025 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja BPSPL Makassar Triwulan III Tahun 2025 terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/ NPSS atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Triwulan III Tahun 2025 adalah **109.47** dengan predikat kinerja **"Baik"**.

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

(IKM 10) Laporan SPIP yang disusun di lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 100% / realisasi satu (3) target yang disusun setiap Triwulan.

(IKM 12) rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 105% / realisasi 100 dari target 95.

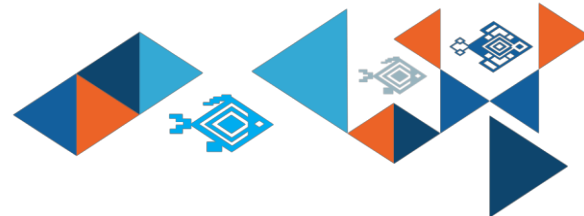
(IKM 16) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 120% / realisasi 100 dari target 76.

Total pagu anggaran tahun 2025 BPSPL Makassar pagu anggaran tahun ini adalah sebesar **Rp 39.810.520.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNBPN dan PLN (Pinjaman Luar Negeri) dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp. 9.850.736.547,-** atau dengan prosentase sebesar **24,74%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir. Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 30,04%** Dimana ada blokir sebesar Rp. 7.020.108.000,-.



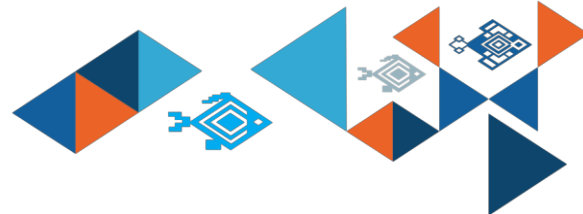
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
.....	8
I. PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3 Tugas dan Fungsi	8
1.4 Organisasi	9
1.6 Sistematika Penyajian.....	12
.....	14
II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT	23
2.4 Postur Anggaran 2025	24
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian kinerja.....	27
3.1.1 IKU1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	27
3.1.2 IKU2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar	28
3.1.3 IKU3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL MakassarDokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	30
3.1.4 IKU 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	33
3.1.5 IKU 5 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	36
3.1.6 IKU5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	37
3.1.7 IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	38
3.1.9 IK9 N ilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai).....	45
3.1.10 IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	46
3.1.11 IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	47
3.1.12 IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%).....	51
3.1.13 IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	53
3.1.13IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	54
3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai).....	55



3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%).....	57
3.1.16IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	59
3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)	61
3.3 Akuntabilitas Keuangan	64
IV. PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Rekomendasi	65
4.3 Tindak Lanjut	65

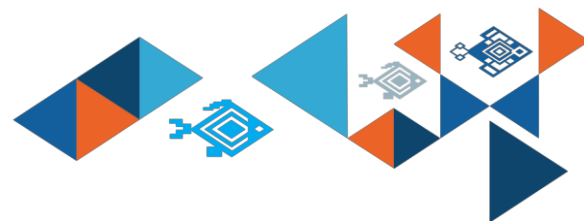




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPSPL Makassar	11
Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025.....	16
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025.....	21
Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025.....	24
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW II Tahun 2025	25
Tabel 7. Capaian IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	27
Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	28
Tabel 9. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis).....	30
Tabel 10. Capaian IKU Realisasi IKU 4	34
Tabel 11. Capaian IKU Realisasi IKU 5	36
Tabel 12. Capaian Realisasi IKU 5	37
Tabel 13. Capaian IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	40
Tabel 14 Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	44
Tabel 15 Capaian IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	46
Tabel 16 Capaian IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen).....	47
Tabel 17 Capaian IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	50
Tabel 18 Capaian IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	52
Tabel 19 Capaian IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%).....	53
Tabel 20 Capaian IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	54



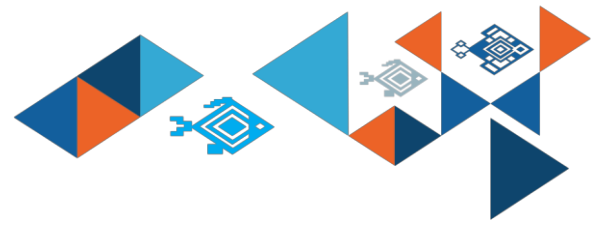


Tabel 21 Capaian IK 15 Nilai Unit pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	56
Tabel 22 Capaian IK 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	58
Tabel 23 Capaian IK 17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	60
Tabel 24. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL.....	61
Tabel 25. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2025	64
Tabel 26. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2025	64
Tabel 27. Tindak lanjut atas rekomendasi TW II Tahun 2025	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.....	9
Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar Tahun 2025.....	10
Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahkan Presiden serta Agenda Perubahan	14
Gambar 4. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku	25
Gambar 5. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar	31



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pelaporan Kinerja merupakan upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, **Pelaporan Kinerja**, dan Reviu dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja (LKj) ini akan memuat hasil pengukuran sasaran strategis dan program / kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan akan tersaji informasi kinerja BPSPL Makassar yang terukur sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja TW III ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Makassar sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) mempunyai tugas **melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekesistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 37/MEN/2021 Tanggal 6 September 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Berkedudukan di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi



Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan PER. 65/MEN/2020 tersebut ada perubahan pada struktur organisasi yang hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Subbagian Umum, dan sisanya adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPSPL Makassar Tahun 2025.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPSPL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut.
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

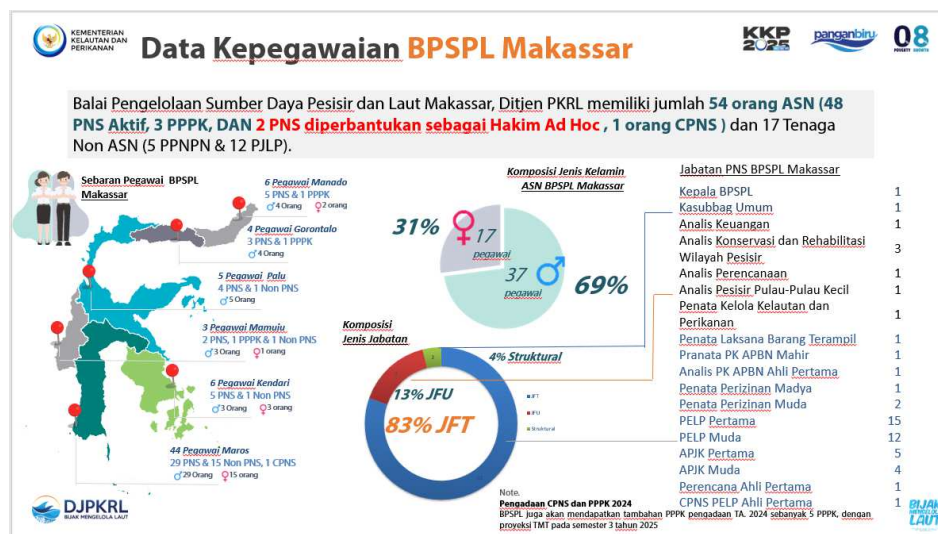
1.4 Organisasi

Secara keorganisasian BPSPL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon III A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan membawahi sub bagian umum dan kelompok jabatan

fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

- A. Sub Bagian umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Sub Koordinator kelompok Tata Usaha adalah Penata Laksana Barang Terampil 1 (satu) orang, Pranata PK APBN Mahir 2 (Dua) orang, dan Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama. Pada Sub Bagian Umum juga terdapat kelompok jabatan fungsional umum yang terdiri dari Analis Perencana 1 (satu) orang. Subbagian Umum juga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Namun pada saat ini baru ada 1 (satu) orang petugas fungsional tertentu Perencana Ahli Pertama yang membantu tugas penyusunan rencana program dan monitoring serta evaluasi, selebihnya dibantu oleh tim kelompok jabatan fungsional tertentu dalam bidang teknis.
- B. Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta analisis ekosistem dan valuasi ekonominya juga kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BPSPL Makassar adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir (PELP) dengan jumlah 28 (Dua Puluh Delapan), Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) dengan jumlah 9 (Sembilan) orang. Penata Perizinan dengan jumlah 3 (tiga) orang dan fungsional umum dengan jumlah 3 (tiga) orang. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 12 (dua belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda dan 1 (Satu) orang Fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) yang masih berstatus CPNS , 6 (enam) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, 4 (empat) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Konservasi dan Rehabilitasi, 1 (satu) orang Analis Pulau-Pulau Kecil dan 1 (satu) orang Penata Kelola Kelautan dan Perikanan.

Berikut ini adalah jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar tahun 2025:



Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar Tahun 2025

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan kerja BPSPL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi. Pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, dan Mamuju, serta Gorontalo. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPSPL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPSPL Makassar

Pendidikan	Golongan (PNS)						P3K	Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b		
D3	2	1						3
D4				3				3
S1	9	15	1	4			3	32
S2		1	1	6	7	1		16
Jumlah Total	11	17	2	13	7	1	3	54

Pada Tahun 2025, jumlah pegawai BPSPL Makassar total yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 54 (Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari 50 (Empat Puluh Sembilan) PNS, 1 (Satu) CPNS dan 3 (tiga) orang P3K. Selain PNS ada juga tenaga kontrak yang bekerja di BPSPL Makassar, jumlah tenaga kontrak sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang dimana 14 (empat belas) orang ditempatkan di Kantor BPSPL Makassar dan 3 (Tiga) orang ditempatkan di masing-masing kantor Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Adapun distribusi pegawai BPSPL Makassar yang lengkap ditunjukkan pada Gambar 2. Sedangkan komposisi pegawai BPSPL Makassar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

1.5 Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan

Pulau Sulawesi merupakan wilayah kerja BPSPL Makassar dengan panjang pantai Pulau Sulawesi kurang lebih 4.270.305 KM, dengan panjang pantai seperti itu dipastikan banyak sekali sumberdaya pesisir yang ada di Pulau Sulawesi seperti pemanfaatan jenis ikan dan pemanfaatan ruang laut yang dapat memberikan sumbangsih pemasukan terhadap negara berupa PNB. P.

Terdapat juga isu yang menjadi isu strategis di wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah dan optimalisasi PNB di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Selain potensi dan sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di Sulawesi antara lain:

1. Pada DIPA BPSPL Makassar terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 7.020.108.000,- pada kegiatan 1) Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut 2) Sosialisai, verifikasi dan pengendalian PKKPR 3) Identifikasi Perizinan Pulau-Pulau Kecil terblokir dan Pemeliharaan Gedung dan bangunan pada dukungan manajemen.
2. Adanya pemberhentian sementara penggunaan dana PLN sampai dengan terbitnya surat persetujuan dari Menteri KKP Dimana proporsi paling besar

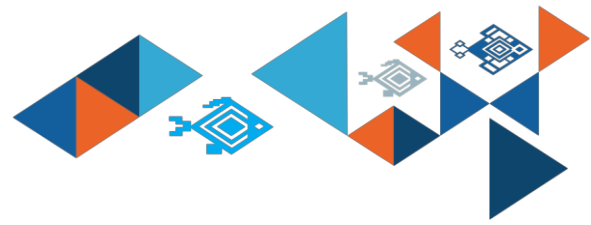


- kegiatan teknis bersumber dari dana PLN (Program Lautra). Anggaran dari sumber PLN baru kembali dibuka diakhir periode semester I sehingga kegiatan baru disusun kembali perencanaannya.
3. Dengan adanya blokir dan pemberhentian sementara penggunaan dana PLN sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pelayanan perizinan maupun kegiatan teknis lainnya.
 4. Komposisi anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025, 62,27% nya berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) atau 94,38% dari anggaran kegiatan teknis, yang mana kegiatan PLN tersebut untuk menunjang kegiatan LAUTRA.
 5. Proporsi yang besar pada kegiatan lautra/PLN mempengaruhi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, Dimana dari 6 wilayah kerja hanya 4 wilayah kerja yang merupakan Lokasi kegiatan lautra.
 6. Kegiatan Survey Biota Perairan di luar wilayah kegiatan Lautra tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak adanya anggaran padahal kegiatan tersebut sangat menunjang data dukung pengusulan kuota pengambilan alam di tahun berikutnya.
 7. Persiapan pengalihan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Perairan kepada KKP diperlukan penunjang sarpras dan SDM khususnya di UPT.
 8. Kegiatan bidang konservasi di luar Lokasi LAUTRA khususnya terkait dengan pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Konservasi sebagai salah satu Upaya peningkatan EVIKA sulit untuk dilaksanakan.
 9. Belum dibedakan kedalaman data untuk permohonan KKPRRL antara pemohon yang akan memanfaatkan ruang laut untuk skala dan resiko kecil dengan skala dan resiko besar.
 10. Belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRRL dan pemohon yang akan mengajukan pemanfaatan ruang laut.
 11. Masih adanya pemanfaatan atau lalu lintas biota dilindungi ataupun *look alike* yang dilakukan lewat jalur darat dan tidak bisa dimonitor oleh BPSPL Makassar. Hal ini mengakibatkan turunnya potensi PNBP.
 12. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove.
 13. Kurangnya tenaga kerja administrasi / bagian umum. Pada saat ini di BPSPL Makassar masih mengalami kekurangan tenaga administrasi dan kekurangan ini diakomodasi dengan memberikan tugas bantuan kepada jabatan fungsional untuk pemenuhan pada bagian keuangan, kepegawaian, persuratan, tata laksana, dan program serta evaluasi.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPSPL Makassar Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:





A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2025 dan penetapan kinerja Tahun 2025 BPSPL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

D. Bab 4 Penutup

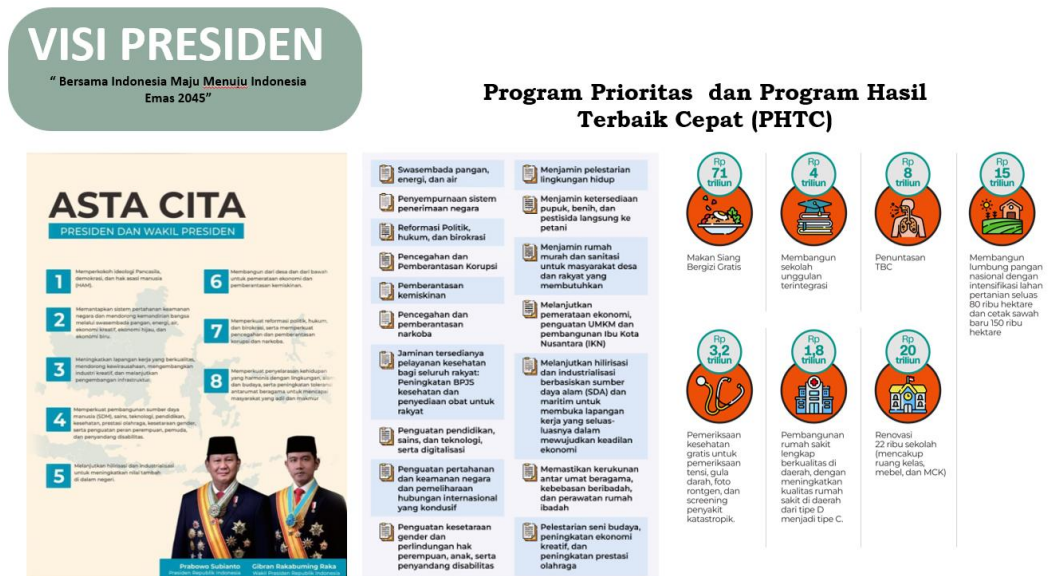
Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2025-2029, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat tentang Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti pada Gambar berikut:



Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahan Presiden serta Agenda Perubahan

RPJMN 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-20245. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN tahun 2025-2029 juga mendasi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi



awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, demikian disebutkan dalam dokumen narasi RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres nomor 12 tahun 2025.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sarasannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan



lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Presiden serta RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang saat ini masih dalam tahap finalisasi rancangan. Renstra KKP Tahun 2025-2029 yang nanti akan disahkan akan menjadi dasar dari penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) serta akan menjadi pedoman bagi BPSPL Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPSPL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat total 16 Indikator Kinerja, jumlah ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun 2024 yang berjumlah 22. Berikut adalah detail perbandingan sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2024 dan 2025:

Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

SASARAN KEGIATAN 2024		SASARAN KEGIATAN 2025	
1	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Makassar	-	
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	-	
3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	-	



SASARAN KEGIATAN 2024		SASARAN KEGIATAN 2025	
5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		-
6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar
7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		-
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar
9	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		-
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran		-
11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar
	-	1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar
	-	6	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar



Berikut adalah perbedaan antara Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 dan tahun 2025:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
1	Nilai PNPB BPSPL Makassar (Rp.)	-	
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	-	
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	-	
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	-	
6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	-	
7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi	-	



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
	di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)		
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	-	
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	-	
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)
16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)
18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	-	
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)
20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	-	





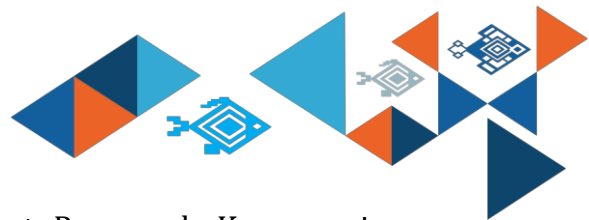
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)
-		1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)
-		6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
-		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)
-		17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
-		4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 mengalami revisi pada bulan juni, selain revisi target pada Perjanjian Kinerja Juni juga ada tambahan satu indikator kinerja sehingga total indikator kinerja yang awalnya terdiri **16 Indikator Kinerja** menjadi **17 Indikator Kinerja** adapun tambahan indikator kinerja itu adalah **Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)**, sehingga Indikator Kinerja BPSPL Makassar setelah revisi terdiri dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 terdapat pengurangan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 dari yang sebelumnya ada 11 IKU. Dari 11 IKU di tahun 2024 ada 3 (Tiga) IKU yang sama dan 2 (Dua) IKU Lainnya berbeda sedangkan pada Indikator Kinerja Menejerial (IKM) pada tahun 2024 dan 2025 sama sama terdapat 11 IKM, namun terdapat 2 (Dua) jenis IKM yang berbeda.

Adapun IKU yang sebelumnya terdapat di tahun 2024 dan tidak terdapat di tahun 2025 antara lain:

1. Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)
2. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
3. Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan KonservasiPerairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL





Makassar (Daerah)

5. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)
6. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
7. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar

Adapun IKU baru di tahun 2025 yang tidak terdapat di tahun 2024 antara lain:

1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)
2. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
3. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Penambahan dan pengurangan indikator seperti dijelaskan diatas dikarenakan beberapa faktor anatara lain:

1. Adanya perubahan komposisi anggaran pada dokumen perencanaan BPSPL Makassar dimana program dan kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilakukan tidak dapat dianggarkan dan dilaksanakan lagi dengan adanya perubahan tersebut.
2. Terdapat program dan kegiatan baru pada BPSPL Makassar pada tahun 2025
3. Adanya penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi setiap indikator untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja.
4. Terkait penambahan Indikator Kinerja Utama Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai) hal tersebut untuk mengakomodir target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berikut ini adalah perjanjian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	175





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80
4.	Terselenggaranya pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	70
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5
		10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95
		13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	80
		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76
		17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91

2.3 Keselarasan PK Eselon I dan UPT

Perjanjian Kinerja di level UPT pasti selaras dengan perjanjian kinerja di eselon 1, karena perjanjian kinerja di level UPT merupakan turunan dari perjanjian kinerja eselon 1. Perjanjian kinerja di level UPT mendukung pencapaian kinerja di eselon 1 baik di Indikator Kinerja Utama maupun di Indikator Kinerja Manajemen.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Eselon 1 terdiri dari Tiga Program, 8 Sasaran Program, dan 11 Indikator Kinerja Program. Sementara Perjanjian Kinerja di BPSPL Makassar Tahun 2025 terdiri dari Tiga Program, Enam Sasaran Kegiatan, dan 17 Indikator Kinerja. Ada beberapa indikator kinerja UPT yang capaiannya secara langsung mendukung capaian indikator kinerja eselon 1 atau dapat dikatakan merupakan bagian dari indikator kinerja eselon 1 seperti Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah, Jenis keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan yang mendukung nilai efektifitas pengelolaan biota perairan, dan indikator manajemen yang ada di BPSPL Makassar mendukung capaian indikator nilai implementasi reformasi birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.



2.4 Postur Anggaran 2025

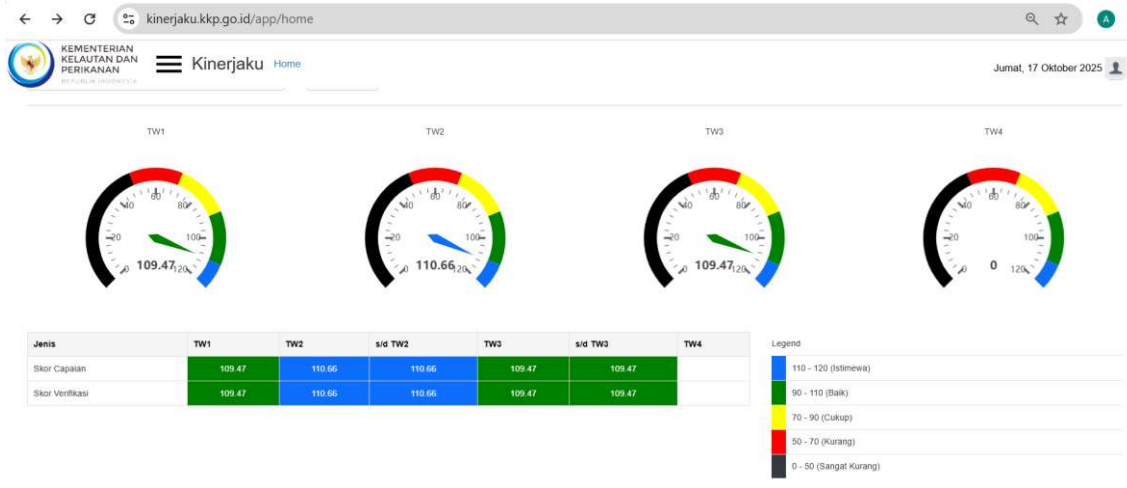
Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2024, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp 39.810.520.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sumber dana sebesar **Rp. 13.546.590.000,-** (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari **Rupiah Murni**, **Rp. 1.475.000,-** (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari **PNBP** dan **Rp. 24.788.930.000,-** (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)) dari **PLN** . Dari Pagu anggaran di atas terdapat blokir anggaran sebesar Rp. Rp. 7.020.108.000,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) sehingga pagu efektif BPSPL Makassar sebesar **Rp. 32.790.412.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) . Blokir ini terdapat di program perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, Perencanaan Ruang Laut dan Dukungan Manajemen. Berikut ini adalah tabel postur anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025.

Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025

KODE/ NAMA KEGIATAN	RUPIAH MURNI (000)	PNBP (000)	PLN (000)	TOTAL (000)	BLOKIR (000)
Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	0	300.000	24.788.930	25.088.930	6.148.568
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Keci;	0	300.000	0	300.000	55.000
Perencanaan Ruang Laut	0	875.000	0	875.000	505.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.546.590	0	0	13.546.590	311.540
Jumlah	13.546.590	1.475.000	24.788.930	39.810.520	7.020.108

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Triwulan III tahun 2025 terdapat tiga (3) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang terdapat capaian targetnya. Nilai Capaian Kinerja BPSPL Makassar Triwulan III Tahun 2025 adalah **109.47** dengan predikat “**Baik**”.

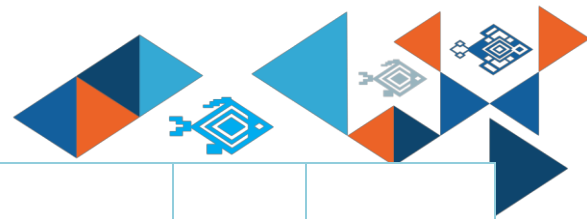


Gambar 4. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

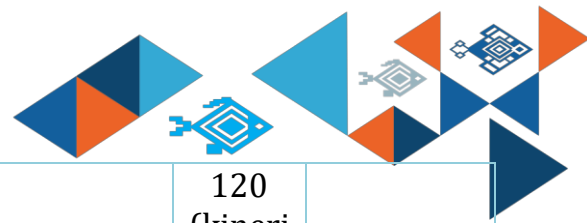
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%	Capaian TW III Terhadap 2025
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	175	-	-	-	-
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	-	-	-	-



4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80	-	-	-	-
5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2	-	-	-	-
6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1	-	-	-	-
7	(Dokumen)Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar	70	-	-	-	-
8	(Nilai)Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89	-	-	-	-
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5	-	-	-	-
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	1	1	100	3
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80	-	-	-	-
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95	95	100	105,26	100
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	80	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76	76	100	131,57 atau	100





					120 (kinerja aku)	
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91	-	-	-	-

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah jumlah daerah (provinsi) di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dilakukan fasilitasi oleh BPSPL Makassar dalam upaya pengelolaan Kawasan konservasi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

Adapun Capaian IKU 1 Pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar

SS -1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thdp TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	4	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU ini tidak terdapat di tahun 2024.





C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III ini adalah sebagai berikut: persiapan/perencanaan ulang dikarenakan sumber anggaran kegiatan berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang baru dibuka pada akhir periode TW II (semester I) Serta Kegiatan

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan III 2025 kegiatan pendukung yang dilaksanakan antara lain:

1. Rehabilitasi Anemon di KK Banggai Dalaka (25 - 31 Juli 2025)
2. Monitoring habitat hiu paus di KKD Teluk Gorontalo (22 – 25 Agustus 2025)
3. Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program Lautra (4 - 8 Agustus 2025)
4. Monitoring Habitat Hiu Paus Gorontalo KKD Teluk Gorontalo
5. Rehabilitasi Anemon BCF KK Banggai Dalaka (25 - 31 Juli 2025)
6. Peningkatan Kompetensi SDM Kawasan Konservasi
7. Pendampingan Penyusunan Dokumen BLUD Kawasan Konservasi Banggai Dalaka dan Tindak Lanjut Pemantauan Inspektorat Jenderal (Itjen) diselenggarakan pada Rabu, 10 September 2025 bertempat di Hotel Best Western Palu, Jl. Basuki Rahmat No. 127, Palu Selatan, Sulawesi Tengah
8. Entry meeting uji substansi pemantauan kegiatan proyek PHLN Lautra pada 22 - 26 September 2025
9. Pengadaan Jasa Konsultan pada kegiatan Reviu Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Teluk Moramo dan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Teluk Gorontalo (Negosiasi dan klarifikasi , pengumuman pemenang tender dan tandatangan kontrak tanggal 26 September 2025)

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena kegiatan belum bisa dilaksanakan analisis efisiensi penggunaan sumber Daya belum dapat dilakukan

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV2025 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.2 IKU2 Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang) adalah Masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun Capaian IKU 2 Pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar





SS -1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	175	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III ini masih dalam tahap persiapan/perencanaan ulang dikarenakan sumber anggaran kegiatan berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang baru dibuka pada akhir periode TW II (semester I).

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan III 2025 kegiatan pendukung yang dilaksanakan antara lain:

1. Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 20-23 Agustus 2025, berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut dan Biota Laut Terdampar di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan peserta sejumlah 20 Orang;
2. Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan Pada hari Senin-Sabtu, 18-23 Agustus 2025, BPSPL Makassar melakukan kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia/Biota Laut Terdampar di Kab. Kepulauan Sangihe dengan jumlah peserta 15 Orang.
3. Penjangkauan Kawasan Konservasi Teluk Moramo, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Agustus 2025 dengan materi Teknik Pengawasan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat dan Rehabilitasi Mangrove berbasis Konservasi dan Ekonomi (Sylvofishery/Wanamina) dengan peserta sejumlah 20 Orang;
4. Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo dilaksanakan Pada 19-21 Agustus 2025, Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut /Biota Laut dengan jumlah peserta 15 Orang.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena kegiatan belum bisa dilaksanakan analisis efisiensi penggunaan sumber Daya belum dapat dilakukan

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 IKU3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Appendiks dan Pari Appendiks);
- Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Napoleon, Teripang dan Sidat).

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah adalah Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Sidat, Teripang, dan Napoleon di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike spesies dan Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun Capaian IKU 3 Pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

SS -1	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	5	-

A. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja pada IKU ini antara lain:

- Pelayanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Dalam Negeri



untuk Jenis Ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam daftar Apendiks CITES
Sampai dengan akhir periode Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam daftar Apendiks CITES melalui penerbitan SAJI DN di wilayah kerja BPSPL Makassar sebanyak 98 Dokumen dan 4 Dokumen SAJI DN Tentengan. Penerbitan SAJI DN sampai periode Triwulan III diterbitkan untuk komoditas jenis Hiu dan Pari Apendiks, Sidat, BCF, Napoleon dan Arwana.

2. Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi (SR) Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) untuk jenis ikan kategori *look alike species*

Untuk jenis ikan kategori *look alike species* sampai dengan akhir periode Triwulan III telah diterbitkan sebanyak 618 dokumen yang terdiri dari 569 Dokumen SR DN dan 56 dokumen SR LN. Penerbitan SR selama periode Triwulan III diterbitkan untuk komoditas jenis Teripang, Hiu dan Pari Look alike species, Anemon dan Soft Coral.

Berikut adalah infografis pelayanan perizinan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan dan Surat Rekomendasi di wilayah kerja BPSPL Makassar selama periode Triwulan III 2025:



Gambar 5. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan perizinan Surat Rekomendasi yang paling banyak adalah dari jenis **Teripang** dengan total surat rekomendasi yang diterbitkan sebanyak **137 Rekomendasi**, disusul dengan soft coral, anemone, dan Hiu Pari. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang terbanyak dari jenis Hiu Pari sebanyak 74 dokumen SAJI, disusul dengan sidat, Napoleon, Arwana dan BCF.

Semua bentuk pemanfaatan jenis yang masuk dalam kategori Appendix II Cites atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki dokumen SIPJI sedangkan lalu lintasnya harus menggunakan dokumen SAJI. Terdapat perbedaan dalam penerbitan dokumen SAJI DN dan LN. Dokumen SAJI DN diterbitkan langsung oleh BPSPL Makassar melalui persetujuan kepala balai sedangkan SAJI LN diterbitkan oleh Direktorat KKHL.

Perbedaan tersebut karena PNPB untuk SAJI LN dibayarkan ke Direktorat KKKHL walaupun untuk verifikasi jenis yang dimohonkan sama-sama diperiksa oleh verifikator BPSPL Makassar baik untuk SAJI DN maupun SAJI LN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

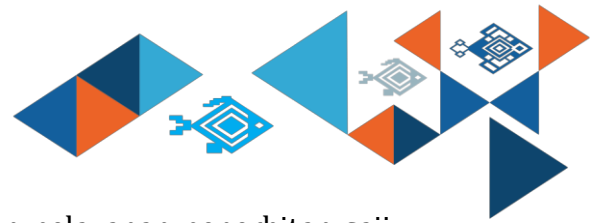
Keberhasilan dalam penerbitan Surat Rekomendasi dan SAJI di BPSPL Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis ikan baik yang masuk Appendiks CITES dan dilindungi serta *look alike species* seperti *soft coral* dan *anemone* dilakukan secara *online* dikarenakan adanya efisisensi dan blokir anggaran yang sampai dengan berakhirnya periode Triwulan II masih belum dapat digunakan.

D. Kegiatan pendukung

Selain pelayanan perizinan penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi, IKU 3 juga didukung progress capaiannya melalui kegiatan konsultasi perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk dalam daftar appendiks CITES. Kegiatan konsultasi ini dilaksanakan baik secara offline (langsung) maupun secara *Online* melalui kontak layanan yang bisa diakses melalui whatsapp. Kegiatan konsultasi perizinan memberikan ruang bagi pelaku usaha pemanfaat jenis ikan/calon pelaku usaha untuk mengetahui berbagai hal tentang tata Kelola pemanfaatan jenis ikan .



dilindungi dan /atau termasuk dalam daftar appendiks CITES serta bagaimana alur perizinan untuk pemanfaatan jenis ikan.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama periode Triwulan III Tahun 2025 kegiatan pelayanan penerbitan saji maupun surat rekomendasi yang mendukung progress capaian IKU 3 dioptimalkan dilaksanakan secara *online*, termasuk dalam pelaksanaan verifikasi produk yang merupakan salah satu bagian dari proses bisnis penerbitan dokumen baik saji maupun surat rekomedasi. Meskipun pelayanan tidak menjadi optimal, namun dengan kegiatan yang dioptimalkan dilakukan secara *online* ini mendukung efisiensi anggaran dan terlebih lagi hingga akhir periode Triwulan III sumber anggaran untuk IKU ini berasal dari PNBPN yang masih diblokir.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 3 pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk dalam daftar apendiks CITES, BAP stok dan Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau apendiks CITES.

3.1.4 IKU 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar terdiri dari Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dan Penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike Species (SR).

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (\text{bobot aspek} \times \sum A) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum B) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum C) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

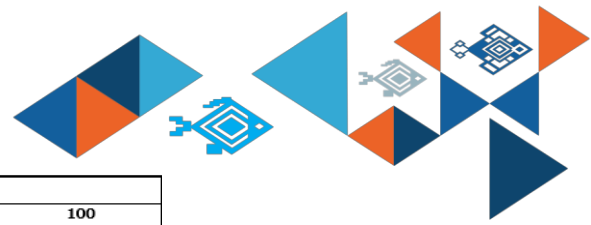
(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan Komponen Perhitungan:





Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai indikator		
				50	75	100
Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI	40%	Dashboard SIPJI	10%	Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		SDM	30%	Ketelitian rendah	ketelitian sedang	Ketelitian tinggi
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Berita Acara	10%	Koreksian > 50%	Koreksian >50%≤ 75%	Tidak ada koreksian
		kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	20%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
Proses Penerbitan SAJI-DN	40%	Dashboard SAJI	10%	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap Penerbitan	10%	Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	Melebihi baku waktu		Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	10%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya
		Nilai SKM	30%	<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7
Penerapan Konvensi	10%	Penerapan Konvensi	100%	Belum Diterapkan	Masih dalam proses penerapan	Telah diterapkan

Capaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian IKU Realisasi IKU 4

SS -4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IKU - 4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

IKU ini tidak memiliki target Triwulan III karena frekuensi pengukuran capaiananya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

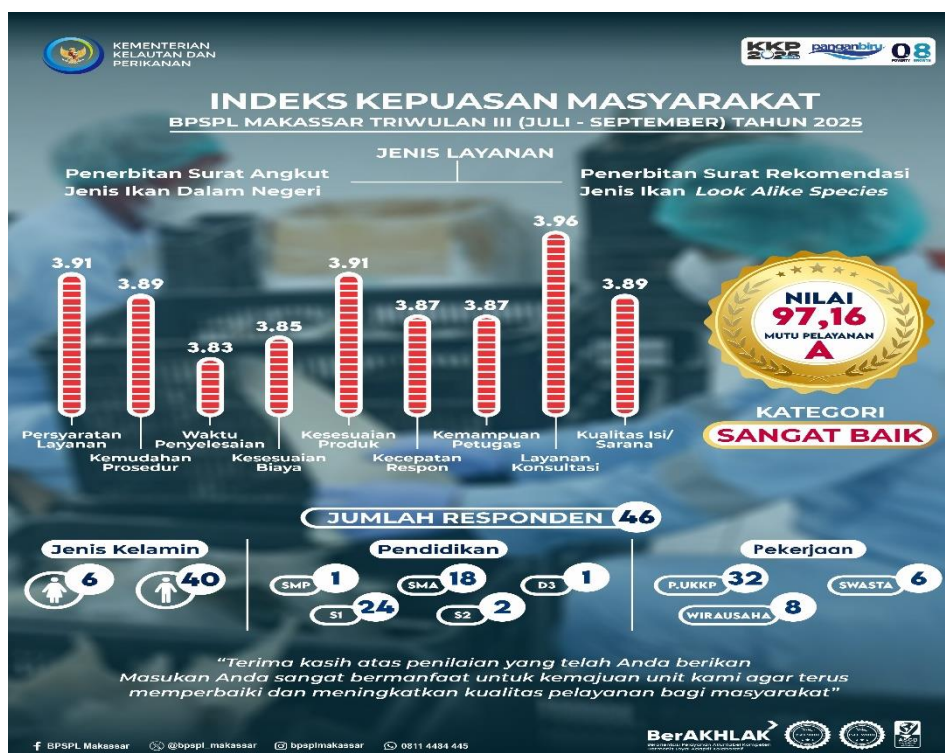


C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Capaian IKU 4 pada Triwulan III 2025 belum dilakukan penilaian, namun hingga TW II tahun 2025 BPSPL Makassar telah melakukan Pelayanan Penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Adapun Standar Pelayanan untuk penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi ditetapkan melalui Penetapan Kepala BPSPL Makassar nomor B.1119/BPSPL.3/PRL.430/VI/2024 dan B.1118/BPSPL.3/PRL.430/VI/2024. Terhadap kedua standar layanan tersebut telah dilakukan review secara internal dan melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada 30 Juni Tahun 2025.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU 4 yang dilaksanakan pada Triwulan III 2025 diantaranya adalah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat TW III, Hasil survey Kepuasan Masyarakat TW III untuk pelayanan Penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi pada Triwulan ke III mendapatkan nilai 97,16 dengan kategori “sangat baik.” Unsur yang dinilai terdiri dari 9 unsur terdiri dari persyaratan layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kesesuaian produk, kecepatan respon, kemampuan petugas, layanan konsultasi dan kualitas sarana/prasarana.

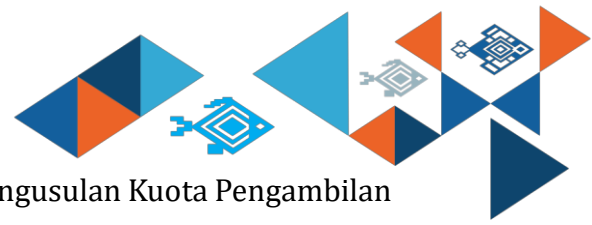


E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama periode Triwulan III Tahun 2025 kegiatan pelayanan penerbitan SAJI DN dan Penerbitan Surat Rekomendasi yang mendukung progress capaian IKU 4 dioptimalkan pelaksanaannya secara *Online*. Adapun kegiatan yang mendukung pelayanan seperti review standar pelayanan ataupun bimtek pelayanan prima yang mendukung kualitas SDM dilakukan secara *hybrid* (*offline* maupun *online*).

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 4 pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah pelaksanaan Pelayanan penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi, Survey Kepuasan Masyarakat TW IV, konsultasi layanan,



Penetapan Kuota Pengambilan Alam Tahun 2025 dan Pengusulan Kuota Pengambilan Alam untuk Tahun 2026.

3.1.5 IKU 5 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU 5 pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian IKU Realisasi IKU 5

SS -5	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IKU - 5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	2	-

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

IKU ini tidak memiliki target Triwulan III karena frekuensi pengukuran capaiananya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Progres capaian IKU 4 pada Triwulan III 2025 adalah BPSPL Makassar sudah melaksanakan penilaian teknis terhadap 124 subjek hukum di wilayah kerja BPSPL Makassar dimana 100 Penilaian teknis dengan penyelenggara Direktorat Penataan Ruang Laut dan 24 Penilaian teknis dengan penyelenggara BPSPL Makassar dengan sebaran wilayah subjek hukum meliputi Sulawesi Tengah 53, Sulawesi Tenggara 32, Sulawesi Selatan 24, Sulawesi Barat 3 , Sulawesi Utara 10 dan Gorontalo 2.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU 5 yang dilaksanakan pada Triwulan III 2025





daiantaranya adalah konsultasi perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), Penilaian Teknis Permohonan perizinan KKPRL serta pengendalian pemanfaatn ruang laut yang dilaksanakan terhadap 12 subjek hukum 6 subjek hukum di Sulawesi Tenggara dan 6 subjek hukum Sulawesi Tengah

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama periode Triwulan III Tahun 2025 kegiatan penilaian teknis penerbitan PKPRL (Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang mendukung progress capaian IKU 4 dioptimalkan pelaksanaannya secara Online.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 5 pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah pelaksanaan kegiatan penilaian teknis dan kegiatan pengendalian KKPRL.

3.1.6 IKU5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Teknik menghitung capaian IKU ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Tabel 12. Capaian Realisasi IKU 5

SS -6	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IKU - 6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian IKU 5 Triwulan III Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulan III karena frekuensi pengukuran capaiananya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan





C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Solusi

Pada triwulan III kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU 3 ini adalah kegiatan Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2025, Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 sampai 13 Agustus 2025, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 17- 21 September 2025 dan di Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 15-21 September 2025.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang dilaksanakan dalam untuk mendukung terlaksananya kegiatan Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah koordinasi dengan Direktorat pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan untuk menyamakan persepsi terkait output kegiatan yang diharapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi anggaran dan suberdaya dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pembagian tugas tiap personil yang ikut dalam kegiatan sehingga meminimalkan personil terlalu banyak dalam pelaksanaan tersebut yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 adalah akan melakukan Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Selayar kembali karena ketika melakukan identifikasidi bulan Agustus masih ada pulau yang belum di Identifikasi dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung.

3.1.7 IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

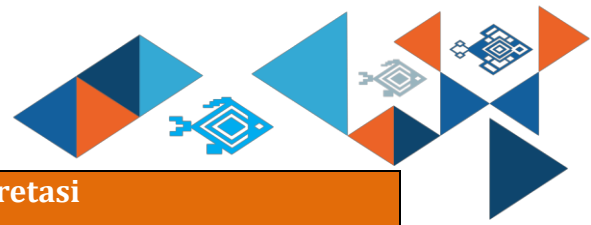
Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

1. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.





Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 13. Capaian IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

SS - 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III ini adalah proses pemenuhan dokumen untuk Penilaian Mandiri SAKIP yang meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, Dokumen Pelaporan Kinerja dan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Pelaksanaan SAKIP DJPK Periode Triwulan III Tahun 2025.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan III 2025 kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi Triwulan II tahun 2025
2. Verifikasi capaian kinerja Triwulan II tahun 2025
3. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi BPSPL Makassar Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai indikator kinerja ini memaksimalkan sumberdaya yang ada secara optimal dan untuk pertemuan-pertemuan dilakukan secara *online* sehingga tidak ada anggaran yang digunakan atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2025 antara lain melengkapi dokumen pendukung untuk pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP.

3.1.8 IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran,



efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- a) Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu Triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu Triwulan (tidak kumulatif)
- b) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- c) Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = \frac{1}{t-1} \sum_{n=1}^n RR_{Rev}$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%

- a) Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) bulanan
- b) Nilai RPD dikunci setiap awal Triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus Triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- c) Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{|R BPeg - RPD BPeg|}{RPD BPeg} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{|R BBar - RPD BBar|}{RPD BBar} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{|R BMod - RPD BMod|}{RPD BMod} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{|DevDIPA BPeg + DevDIPA BBar + DevDIPA BMod|}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- a) Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan



- b) Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap Triwulan
- c) Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- d) Target Penyerapan masing-masing belanja
Target Triwulan dihitung dengan
$$[TA]_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$[TPBelPeg]_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke -n$

$[TPBelBar]_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke -n$

$[TPBelMod]_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke -n$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$[NKPA]_n = ((PA_n) / (TP_n)) \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- a) Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- b) Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- c) Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- d) Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan II mendapat poin 100, Triwulan III 90, Triwulan IIII 80, Triwulan IIV 70.
$$KPA BK = NK - Kw * 40\% + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- a) Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- b) 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- c) Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = SPM LS TW / SPM LS \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- a) Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- b) Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)



- a. Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggung jawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK -UPKW= i=1n \times KWUPnGUP+nPTUP$$

- c) Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebutkan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
d) %GUP disebutkan = % GUP x (jml hari sebulan)/ Δt GUP
NK -PGUP= $i=1n \times PGUPnGUP$

- e) Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran
 $NKSetor=100 - Setoran TUP \times 100$

- f) Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP
 $IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$

7. Dispensasi Penyampaian SPM – (Pengurang Nilai IKPA)

- a) Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada Triwulan IIV,
b) Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	$\geq 5,00$

- c) Rasio Dispensasi (permil)
 $RDSPM = SPM \text{ Dispensasi} / SPM \text{ Tw UV} \times 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- a) Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
b) Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya
 $NK ROKW = (\sum_{i=1}^n ROKW) / n$
c) Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO Triwulan II sampai dengan Triwulan IIII berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target Triwulan IIV sama dengan target RO pada DIPA
d) RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = (((\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}) / \text{Target RO}) / n)$$

e) Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Tabel 14 Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

SS - 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara semesteran.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan. Hal ini dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai pada 8 Indikator dalam penilaian IKPA.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini meliputi :

- Melakukan Revisi DIPA dan Halaman 3 DIPA tepat waktu
- Mendapatkan dan melakukan pembayaran belanja Kontraktual tepat waktu
- Penyelesaian Tagihan tepat waktu
- Pengelolaan UP dan TUP dengan baik
- Pengisian capaian output tepat waktu
- Penyerapan anggaran sesuai target
- Mengurangi bahkan menghilangkan kesalahn SPM

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan SPM, Oprator SAKTI dan bendahara pengeluaran, serta penginputan capaian output yang tepat waktu serta selalu mengingatkan agar mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan SPM maupun menyampaikan laporan. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.



F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2025 antara lain melaksanakan koordinasi yang baik secara konsisten antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan untuk dapat memaksimalkan capaian 8 indikator kinerja tersebut.

3.1.9 IK9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO	: Capaian RO Penggunaan SBK
Penggunaan SBK	: Penggunaan SBK
NEAlokasi	: Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO	: Bobot Capaian RO
Wpenggunaan SBK	: Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi	: Bobot Efisiensi Alokasi



Tabel 15 Capaian IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	71,5	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara Tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan dan keuangan selaku operator capaian output. Hal ini dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai pada Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah melakukan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan capaian output dan perencanaan dalam penyusunan SBK pada penyusunan perencanaan anggaran. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2025 antara lain melaksanakan koordinasi yang baik secara konsisten antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan untuk dapat memaksimalkan capaian 8 indikator kinerja tersebut.

3.1.10 IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP Triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 16 Capaian IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
3	3	3	100	0	4	75

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini adalah 3 (tiga) laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 dan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 yang telah disusun dan dilaporkan ke sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 adalah sama dimana realisasinya adalah 3 (tiga) dokumen pada Triwulan III tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian Triwulan III adalah karena koordinasi yang baik dari semua komponen yang terlibat dan komitmen dari anggota tim SPIP yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan laporan sesuai waktu yang sudah ditetapkan.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah penyusunan dan pengusulan TIM SPIP tahun 2025 dan pelaksanaan koordinasi yang baik dalam setiap penyusunan laporan SPIP kepada seluruh tim.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari tim SPIP yang sudah ditetapkan. Tidak ada efisiensi sumber daya anggaran karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung IK ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain penyusunan laporan SPIP Triwulan III dengan melakukan koordinasi yang baik setiap tim dan penanggung jawab kegiatan.

3.1.11 IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya



serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

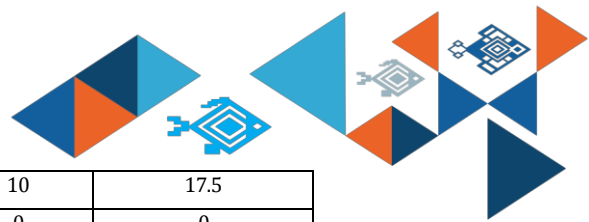
- a) Kualifikasi bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA A / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- b) Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			





	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

b. Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

c. Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

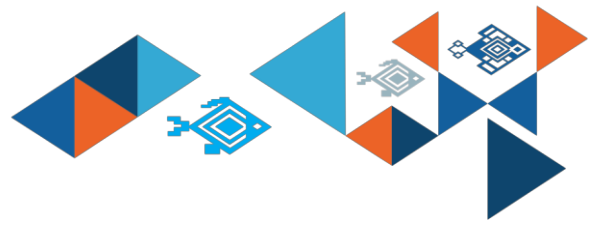
Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

d. Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019





$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Tabel 17 Capaian IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara semesteran.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III adalah pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV atas nama Munandar Jakasukmana dan Pelaksanaan Pelatihan e-learning





Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025 Lingkup BPSPL Makassar pada aplikasi E-Milea KKP.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 terdapat kegiatan pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV atas nama Munandar Jakasukmana dan Pelaksanaan Pelatihan e-learning Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025 Lingkup BPSPL Makassar pada aplikasi E-Milea KKP, dan juga pelatihan-pelatihan online maupun offline lainnya baik yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun oleh instansi lain.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya anggaran yang sangat minim dalam peningkatan kompetensi salah satunya karena banyak Pelatihan, Bimtek maupun seminar yang dilakukan secara *online*, sehingga sangat memudahkan bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa anggaran.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain penyampaian informasi pelatihan atau bimbingan teknis serta seminar kepada pegawai BPSPL Makassar.

3.1.12 IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.



Tabel 18 Capaian IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

SS - 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
100	95	100	105,26	0	95	105,26

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini sebesar sebesar 100 dari target Triwulan III sebesar 95 dengan presentase 105,26% dari target. Pada Triwulan III telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan Kegiatan PHLN Ocean for Prosperity – LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024; dan Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di BPSPL Makassar, dari 11 (sebelas) jumlah rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut seluruhnya sehingga presentase capaian jumlah tindak lanjut sebesar 100%. Capaian pada IK ini juga tertuang dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B. 2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 100 apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 sebesar 100 dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan capaian apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pencapaian target kegiatan yang mendukung indikator ini dikarenakan dukungan dan arahan dari pimpinan tentang penyelesaian rekomendasi Itjen dan juga kerjasama dan koordinasi oleh seluruh staf yang bertanggungjawab dalam penyelesaian rekomendasi tersebut.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan III 2025 adalah mengikuti Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW II1 2025 dan koordinasi penyelesaian tindaklanjut dengan Sesditjen PKRL serta Inspektorat I KKP.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian rekomendasi itjen tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal apabila terpat audit, pemantauan dan evaluasi.

3.1.13 IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Makassar Tahun 2024.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Makassar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjajaku adalah 100.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

3. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
4. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 19 Capaian IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara Tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta Solusi tidak dapat dilakukan .



D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II belum ada kegiatan pendukung.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan apabila terpat audit, pemantauan dan evaluasi.

3.1.13 IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Keterangan Ukuran:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “sbnm67 Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 20 Capaian IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III





Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara Tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta Solusi tidak dapat dilakukan .

D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan III BPSPL Makassar telah dilakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas terhadap unit kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) tahun 2025 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) pada tanggal 25 Februari s.d 3 Maret 2025 secara *Online*. Kegiatan ini dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB. BPSPL Makassar juga telah melakukan Wawancara terhadap Unit Kerja yang Diusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis, 31 Juli 2025. Setelah melakukan Wawancara BPSPL Makassar melaksanakan Evaluasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada 26 s.d 28 Agustus 2025 bertempat di BPSPL Makassar.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.

3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.





1. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 21 Capaian IK 15 Nilai Unit pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	80	-





A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta Solusi tidak dapat dilakukan.

D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan III adalah pelaksanaan Pengisian Data Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PKRL yang bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian yaitu terlaksananya digitalisasi arsip di lingkungan KKP. BPSPL Makassar juga melakukan Verifikasi Data Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2025 yang dilaksanakan pada 9 September 2025 secara daring dan pelaksanaan Asistensi Persiapan Penilaian Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup UPT pada Rabu – Kamis, 6 – 7 Agustus 2025 Secara daring. Pengisian Data Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PKRL dan dengan adanya pembaruan teknis sistem pengisian data serta batas waktu yang telah ditentukan BPSPL Makassar menghadiri kegiatan Persiapan pengawasan internal kearsipan dan Pengisian Form ASKII yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat Kawaluso Lt. 9 GMB 3.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain adalah pemenuhan dokumen pendukung dalam pelaksanaan penilaian kearsipan.

3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 22 Capaian IK 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	76	100	120	-	76	120

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini sebesar 100 dari target Triwulan III sebesar 76 dengan presentase 120% (Kinerjaku) dari target. Capaian IK ini tertuang dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan yang mendukung indikator ini dikarenakan koordinasi yang baik antara operator SIRUP dengan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam penyusunan dokumen pengadaan dan penginputan sirup secara tepat waktu.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan III 2025 adalah mengikuti asistensi dan diskusi terkait penyesuaian SIRUP pasca efisiensi anggaran tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan PBJ pada 12 Maret 2025 secara *online* dan pelaksanaan revisi Rencana umum pengadaan pada Bulan Juli dalam mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi kegiatan LAUTRA.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian indikator ini tersebut tidak menggunakan anggaran pada Triwulan III sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain adalah revisi RUP pasca dilakukan revisi anggaran.

3.1.16 IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup BPSPL Makassar sesuai dengan kriteria:

- a. informatif dengan nilai 97-100;
- b. menuju informatif dengan nilai 80-96;
- c. cukup informatif dengan nilai 60-79;
- d. kurang informatif dengan nilai 40-59;
- e. tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai

No	ASPEK YANG DINILAI	SUB-NILAI	PRESENTASI	TOTAL	BOBOT	HASIL
TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionnaire)						
1	Mengumumkan Informasi Publik	15	60%	60	80%	80
2	Menyediakan Dokumen Informasi	25				
3	Sarana Prasarana	30	40%	40		
4	Kelembagaan	20				
5	Digitalisasi	10				
Jumlah		100	100%	100		
TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INOFORMASI PUBLIK						
1	Presentasi Publik	100	100%	100	20%	20
Jumlah		100	100%	100		
TOTAL NILAI KESELURUHAN					100%	100

Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 80% dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit

organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung.

Tabel 23 Capaian IK 17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW III	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	91	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara tahunan dan juga indikator ini merupakan indikator baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi tidak dapat dilakukan.

D. Kegiatan pendukung

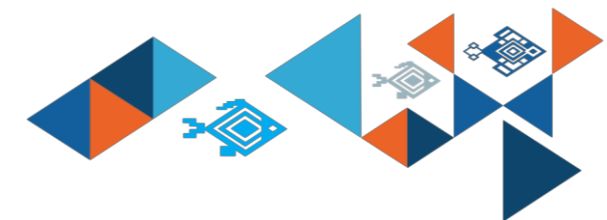
Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan III BPSPL Makassar melakukan Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh tim pengelola PPID pada Aplikasi PELIKAN dalam menunjang Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan pada bulan September Tahun 2025 di lokasi kantor BPSPL Makassar.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2025 antara lain adalah pemenuhan dokumen pendukung dalam pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik.

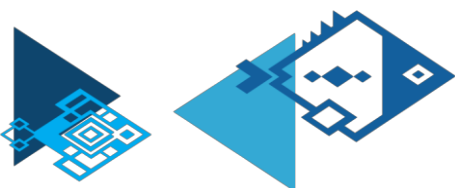


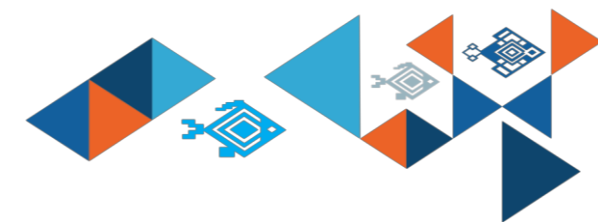
3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)

Indikator kinerja diantara UPT PSPL hampir sama satu sama lain. Untuk detail perbandingan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di lingkup DJPRL pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

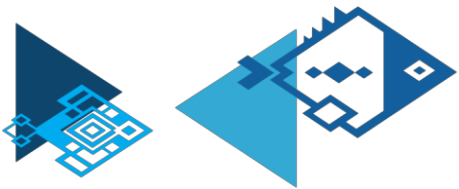
Tabel 24. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL

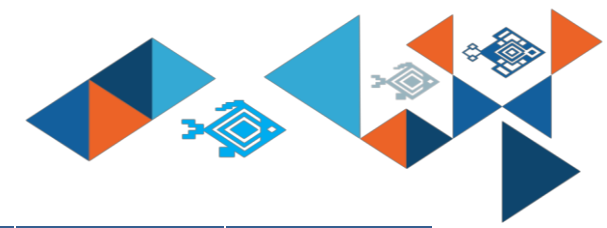
Indikator Kinerja			BPSPL MAKASSAR	BPSPL PONTIANAK	BPSPL PADANG	BPSPL DENPASAR	LPSPL SERANG	LPSPL SORONG
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	Target	4	1	3	1	1	3
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	Target	175	24	25	30	30	20
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	Target	5	4	5	5	5	3
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-



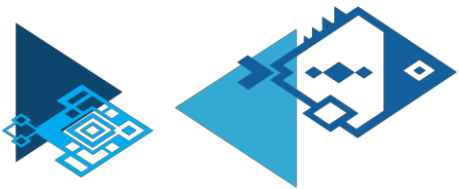


5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	2	2	2	2	2	2
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	88	88	88	88	88	88
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	Target	92	92	92	92	92	92
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	Target	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	4	4	4	4	4	4
		Capaian	1	1	1	1	1	1
		%	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	-	-	-	-	-	-





	(Indeks)	%	-	-	-	-	-	-
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	95	95	95	95	95	95
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	100	100	100	100	100	100
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	Target	75	85	85	75	75	75
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	76	76	76	76	76	76
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	120	120	120	120	120	120
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	91	91	91	91	91	91
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-



3.3 Akuntabilitas Keuangan

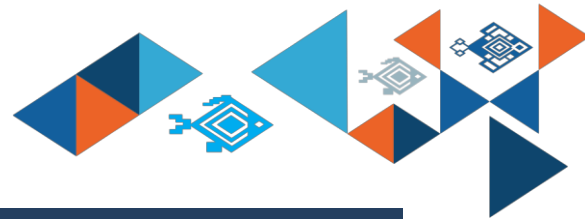
Tabel 25. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	25.088.930.000	1.058.352.495	4,22%	24.030.577.505
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	63.069.445	21,02%	236.930.555
Penataan Ruang Laut	875.000.000	99.476.161	11,37%	775.523.839
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	13.546.590.000	8.607.195.675	63,54%	4.939.394.325
TOTAL	39.810.520.000	9.828.093.776	24,69%	29.982.426.224

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2025, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp39.810.520.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNPB dan PLN (Pinjaman Luar Negeri) dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar sampai dengan Triwulan III adalah sebesar **Rp9.828.093.776,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** atau dengan prosentase sebesar **24,69%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir. Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 29,97%** Dimana ada blokir sebesar **Rp7.020.108.000,-**. Sisa anggaran adalah sebesar **Rp29.982.426.224,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**.

Sampai dengan Triwulan III 2025 revisi anggaran sudah dilaksanakan lima kali baik itu revisi yang bersifat kewenangan KPA yaitu Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan yang bersifat kewenangan DJA maupun Kanwil yaitu revisi DIPA. Berikut adalah daftar revisi yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar:

Tabel 26. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2025



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPSPL Makassar Triwulan III Tahun 2025 adalah kategori **Baik** dengan nilai kinerja organisasi **109.47 %**, sementara capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar **Rp9.828.093.776,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** atau dengan prosentase sebesar **24,69%** dari pagu total **Rp 39.810.520.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**. Terdapat Blokir anggaran sebesar **Rp. 7.020.108.000,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah)**, sehingga presentasi realisasi tanpa blokir sebesar **29,97%** .

Capaian Indikator Kinerja Manajerial pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target Triwulanan dengan capaian satu laporan dari target satu laporan.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 105% / realisasi 100 dari target 95.
3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 120% / realisasi 100 dari target 76.

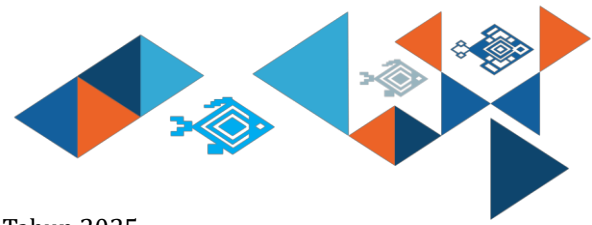
4.2 Rekomendasi

Terdapat rekomendasi untuk mendukung kinerja pada Triwulan IV yaitu penyampaian kepala BPSPL Makassar kepada ketua tim kerja untuk melakukan akselesari kegiatan lautra pasca realokasi OMS .

4.3 Tindak Lanjut

Terdapat rekomendasi pada Triwulan II Tahun 2025 yang harus dilakukan tindak lanjut pada Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan tabel di bawah ini:

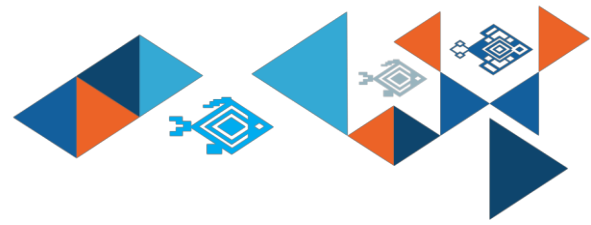




Tabel 27. Tindak lanjut atas rekomendasi TW I Tahun 2025

Rekomendasi TW II Tahun 2025	Tindak Lanjut atas Rekomendasi TW I I Tahun 2025	Tautan Data Dukung
Penyampain kepala BPSPL Makassar kepada ketu tim kerja untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran	Telah dilakukan Penyampain kepala BPSPL Makassar kepada ketua tim kerja untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1mijrqLy2Hql3k_pMjiEjxoEyNR6kD4iL?usp=drive_link





LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B. 2556/DJPK.1/TU.210/X/2025 14 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan III Tahun 2025

Yth. 1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program
Di Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 944/ITJ.0/RC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan III Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 81,5% yaitu sebanyak 163 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 200 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke IV Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal PK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

Nomor : B.2556/DJPK.1/TU.210/X/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU

“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	55	44	80	13	3	80
2	Dit. KE	22	18	82	13	1,4	82
3	Dit. P3K	25	20	80	11	0.7	80
4	Dit. Jasbar	5	5	100	100	0	100
5	Dit. SDK	19	19	100	100	0	100
6	Dit. KSG	8	8	100	100	0	100
7	BKKPN Kupang	15	15	100	100	0	100
8	BPSPL Makasar	18	18	100	100	0	100
9	BPSPL Padang	9	9	100	100	0	100
10	LPSPL Sorong	10	10	100	100	0	100
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	15	15	100	100	0	100
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	100	0	100
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		200	163	81,50	37	14,4	81,50

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 8 Oktober 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB, secara keseluruhan satuan kerja telah mencapai persentase 100,00%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Tanggal : 8 Oktober 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 3	% Capaian Target IKU TW 3	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	3,875,626,164,822	3,875,626,164,822				100.00%	



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Tanggal : 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
B	Inspektorat Jenderal	5,976,879,000	-	5,976,879,000	5,976,879,000	-	5,976,879,000	-	100.00%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	5,976,879,000	-	5,976,879,000	5,976,879,000		5,976,879,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
D	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	103,641,596,000	28,942,973,000	132,584,569,000	103,641,596,000	28,942,973,000	132,584,569,000	-	100.00%
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	8,346,508,000		8,346,508,000	8,346,508,000	-	8,346,508,000	-	100.00%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000		11,611,482,000	11,611,482,000	-	11,611,482,000	-	100.00%
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000		8,049,166,000	8,049,166,000	-	8,049,166,000	-	100.00%
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	29,905,446,000	11,145,622,000	41,051,068,000	29,905,446,000	11,145,622,000	41,051,068,000	-	100.00%
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,980,003,000		3,980,003,000	3,980,003,000	-	3,980,003,000	-	100.00%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	12,951,236,000	3,327,515,000	16,278,751,000	12,951,236,000	3,327,515,000	16,278,751,000	-	100.00%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,192,845,000	653,692,000	7,846,537,000	7,192,845,000	653,692,000	7,846,537,000	-	100.00%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,931,932,000		4,931,932,000	4,931,932,000	-	4,931,932,000	-	100.00%
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	2,672,146,000	3,163,875,000	5,836,021,000	2,672,146,000	3,163,875,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	4,193,405,000	4,999,652,000	9,193,057,000	4,193,405,000	4,999,652,000	9,193,057,000	-	100.00%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	1,484,027,000	1,597,437,000	3,081,464,000	1,484,027,000	1,597,437,000	3,081,464,000	-	100.00%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,583,509,000	160,000,000	6,743,509,000	6,583,509,000	160,000,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	1,739,891,000	3,895,180,000	5,635,071,000	1,739,891,000	3,895,180,000	5,635,071,000	-	100.00%
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000		1,253,261,000	1,253,261,000	-	1,253,261,000	-	100.00%
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	5,010,473,000	2,314,090,000	7,324,563,000	5,010,473,000	2,314,090,000	7,324,563,000	-	100.00%
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	986,349,204,103	4,671,318,000	991,020,522,103	986,349,204,103	4,671,318,000	991,020,522,103	-	100.00%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
H	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	-	100.00%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	-	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000		2,534,284,000	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	5,100,517,000		5,100,517,000	5,100,517,000		5,100,517,000	-	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	96,216,000		96,216,000	96,216,000		96,216,000	-	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	385,776,000	1,222,141,000	1,607,917,000	385,776,000	1,222,141,000	1,607,917,000	-	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	1,705,088,000	4,944,580,000	6,649,668,000	1,705,088,000	4,944,580,000	6,649,668,000	-	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	1,861,945,000		1,861,945,000	1,861,945,000		1,861,945,000	-	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	1,947,816,000		1,947,816,000	1,947,816,000		1,947,816,000	-	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	17,074,273,000		17,074,273,000	17,074,273,000		17,074,273,000	-	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000		1,453,775,000	1,453,775,000		1,453,775,000	-	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,378,245,000		2,378,245,000	2,378,245,000		2,378,245,000	-	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,550,829,000		3,550,829,000	3,550,829,000		3,550,829,000	-	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,868,698,000		1,868,698,000	1,868,698,000		1,868,698,000	-	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,372,192,000	197,970,000	4,570,162,000	4,372,192,000	197,970,000	4,570,162,000	-	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,760,962,000		4,760,962,000	4,760,962,000		4,760,962,000	-	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	902,114,000		902,114,000	902,114,000		902,114,000	-	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,685,011,000	103,084,000	5,788,095,000	5,685,011,000	103,084,000	5,788,095,000	-	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	190,204,000	1,265,939,000	1,456,143,000	190,204,000	1,265,939,000	1,456,143,000	-	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBL	435,469,000	56,885,000	492,354,000	435,469,000	56,885,000	492,354,000	-	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	439,115,000	480,771,000	919,886,000	439,115,000	480,771,000	919,886,000	-	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,930,550,000		1,930,550,000	1,930,550,000	-	1,930,550,000	-	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000	-	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	14,749,211,000		14,749,211,000	14,749,211,000		14,749,211,000	-	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	1,797,869,000		1,797,869,000	1,797,869,000		1,797,869,000	-	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	572,296,000	2,363,918,000	2,936,214,000	572,296,000	2,363,918,000	2,936,214,000	-	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	848,422,000	837,013,000	1,685,435,000	848,422,000	837,013,000	1,685,435,000	-	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	658,207,000	1,078,219,000	1,736,426,000	658,207,000	1,078,219,000	1,736,426,000	-	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	28,407,071,644		28,407,071,644	28,407,071,644	-	28,407,071,644	-	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,250,072,524	1,221,557,000	2,471,629,524	1,250,072,524	1,221,557,000	2,471,629,524	-	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,012,876,000		2,012,876,000	2,012,876,000		2,012,876,000	-	100.00%

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
H	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	-	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	7,515,109,000	-	7,515,109,000	7,515,109,000		7,515,109,000	-	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,195,333,000	5,209,960,000	7,405,293,000	2,195,333,000	5,209,960,000	7,405,293,000	-	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,284,200,000		7,284,200,000	7,284,200,000		7,284,200,000	-	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000		1,296,505,000	1,296,505,000		1,296,505,000	-	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	439,179,000	1,950,458,000	2,389,637,000	439,179,000	1,950,458,000	2,389,637,000	-	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1,814,020,000		1,814,020,000	1,814,020,000		1,814,020,000	-	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	785,173,000		785,173,000	785,173,000		785,173,000	-	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	644,025,000		644,025,000	644,025,000		644,025,000	-	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,109,942,000		1,109,942,000	1,109,942,000		1,109,942,000	-	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	-	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	716,506,016,966		716,506,016,966	716,506,016,966		716,506,016,966	-	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	159,690,000		159,690,000	159,690,000	-	159,690,000	-	100.00%



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
I	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	2,892,982,000		2,892,982,000	2,892,982,000		2,892,982,000	-	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	454,583,300		454,583,300	454,583,300		454,583,300	-	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324		945,341,324	945,341,324		945,341,324	-	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	254,838,000	373,548,000	628,386,000	-	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	565,163,000		565,163,000	565,163,000		565,163,000	-	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	1,784,010,000		1,784,010,000	1,784,010,000		1,784,010,000	-	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,857,219,000		1,857,219,000	1,857,219,000		1,857,219,000	-	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	399,150,000		399,150,000	399,150,000		399,150,000	-	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	1,711,693,000		1,711,693,000	1,711,693,000		1,711,693,000	-	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000		1,082,514,000	1,082,514,000		1,082,514,000	-	100.00%

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
I	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	2,227,785,000		2,227,785,000	2,227,785,000		2,227,785,000	-	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,486,140,000		1,486,140,000	1,486,140,000		1,486,140,000	-	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	4,601,969,000		4,601,969,000	4,601,969,000		4,601,969,000	-	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800		154,755,800	154,755,800		154,755,800	-	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	2,714,969,000		2,714,969,000	2,714,969,000		2,714,969,000	-	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	6,369,048,000		6,369,048,000	6,369,048,000		6,369,048,000	-	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	351,241,000		351,241,000	351,241,000		351,241,000	-	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	338,737,000		338,737,000	338,737,000		338,737,000	-	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	1,035,194,000		1,035,194,000	1,035,194,000		1,035,194,000	-	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698		1,351,261,698	1,351,261,698		1,351,261,698	-	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000		436,771,000	436,771,000		436,771,000	-	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	2,045,141,000		2,045,141,000	2,045,141,000		2,045,141,000	-	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	226,766,000		226,766,000	226,766,000		226,766,000	-	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000		190,000,000	190,000,000		190,000,000	-	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	-	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	658,352,000		658,352,000	658,352,000		658,352,000	-	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000		768,055,000	768,055,000		768,055,000	-	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	744,295,000		744,295,000	744,295,000		744,295,000	-	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	664,903,000		664,903,000	664,903,000		664,903,000	-	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	687,840,000		687,840,000	687,840,000		687,840,000	-	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000		474,690,000	474,690,000		474,690,000	-	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000		1,006,732,000	1,006,732,000		1,006,732,000	-	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	392,002,000		392,002,000	392,002,000		392,002,000	-	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	1,490,057,000		1,490,057,000	1,490,057,000		1,490,057,000	-	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	112,965,000		112,965,000	112,965,000		112,965,000	-	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	810,283,000		810,283,000	810,283,000		810,283,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
F	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	12,743,424,000	-	12,743,424,000	12,743,424,000	-	12,743,424,000	-	100.00%
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,743,424,000		12,743,424,000	12,743,424,000		12,743,424,000	-	100.00%
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	39,190,141,281		39,190,141,281	39,190,141,281		39,190,141,281	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
C	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	-	100.00%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	-	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	-	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	4,447,072,000		4,447,072,000	4,447,072,000	-	4,447,072,000	-	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,539,681,000		3,539,681,000	3,539,681,000	-	3,539,681,000	-	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	437,742,234,663		437,742,234,663	437,742,234,663	-	437,742,234,663	-	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000		2,884,668,000	2,884,668,000	-	2,884,668,000	-	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,019,499,000		2,019,499,000	2,019,499,000	-	2,019,499,000	-	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,915,697,000		3,915,697,000	3,915,697,000	-	3,915,697,000	-	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000		2,200,792,000	2,200,792,000	-	2,200,792,000	-	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000		1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	1,158,531,231,000	-	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,103,286,000		2,103,286,000	2,103,286,000	-	2,103,286,000	-	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	850,730,000	2,026,728,000	2,877,458,000	850,730,000	2,026,728,000	2,877,458,000	-	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,208,763,000	6,400,000	1,215,163,000	1,208,763,000	6,400,000	1,215,163,000	-	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	-	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,872,026,000		2,872,026,000	2,872,026,000	-	2,872,026,000	-	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,941,647,000	37,642,000	1,979,289,000	1,941,647,000	37,642,000	1,979,289,000	-	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000		2,089,461,000	2,089,461,000	-	2,089,461,000	-	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,869,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	3,869,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	-	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,278,619,000	31,000,000	59,309,619,000	59,278,619,000	31,000,000	59,309,619,000	-	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000		2,358,509,000	2,358,509,000	-	2,358,509,000	-	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	4,130,340,800		4,130,340,800	4,130,340,800	-	4,130,340,800	-	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	35,948,521,000		35,948,521,000	35,948,521,000	-	35,948,521,000	-	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,847,989,000		15,847,989,000	15,847,989,000	-	15,847,989,000	-	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
E	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	336,647,410,000	2,406,000	336,649,816,000	336,647,410,000	2,406,000	336,649,816,000	-	100.00%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	17,690,544,000		17,690,544,000	17,690,544,000	-	17,690,544,000	-	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	11,018,108,000		11,018,108,000	11,018,108,000	-	11,018,108,000	-	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	19,093,772,000		19,093,772,000	19,093,772,000	-	19,093,772,000	-	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	16,268,690,000		16,268,690,000	16,268,690,000	-	16,268,690,000	-	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	16,699,218,500		16,699,218,500	16,699,218,500	-	16,699,218,500	-	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,767,797,500		16,767,797,500	16,767,797,500	-	16,767,797,500	-	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	163,921,048,000		163,921,048,000	163,921,048,000	-	163,921,048,000	-	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,283,210,000		14,283,210,000	14,283,210,000	-	14,283,210,000	-	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	16,166,999,000		16,166,999,000	16,166,999,000	-	16,166,999,000	-	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	7,725,242,000	2,406,000	7,727,648,000	7,725,242,000	2,406,000	7,727,648,000	-	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,389,614,000		9,389,614,000	9,389,614,000	-	9,389,614,000	-	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	5,318,969,000		5,318,969,000	5,318,969,000	-	5,318,969,000	-	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,976,008,000		8,976,008,000	8,976,008,000	-	8,976,008,000	-	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	7,059,085,000		7,059,085,000	7,059,085,000	-	7,059,085,000	-	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,269,105,000		6,269,105,000	6,269,105,000	-	6,269,105,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
G	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	89,119,323,985	-	89,119,323,985	89,119,323,985	-	89,119,323,985	-	100.00%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	26,318,377,000		26,318,377,000	26,318,377,000		26,318,377,000	-	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSP PADANG	2,914,499,000		2,914,499,000	2,914,499,000		2,914,499,000	-	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	5,826,547,000		5,826,547,000	5,826,547,000		5,826,547,000	-	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,206,467,000		19,206,467,000	19,206,467,000		19,206,467,000	-	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,343,328,000		2,343,328,000	2,343,328,000		2,343,328,000	-	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	3,217,528,985		3,217,528,985	3,217,528,985		3,217,528,985	-	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	3,062,287,000		3,062,287,000	3,062,287,000		3,062,287,000	-	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	26,230,290,000		26,230,290,000	26,230,290,000		26,230,290,000	-	100.00%
9	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	941,754,537,201	50,284,466,000	992,039,003,201	941,754,537,201	50,284,466,000	992,039,003,201	-	100.00%

 Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
A	Sekretariat Jenderal	328,436,495,996	14,006,635,000	342,443,130,996	328,436,495,996	14,006,635,000	342,443,130,996	-	100.00%
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10,053,931,000		10,053,931,000	10,053,931,000	-	10,053,931,000	-	100.00%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	314,813,237,996	14,006,635,000	328,819,872,996	314,813,237,996	14,006,635,000	328,819,872,996	-	100.00%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,569,327,000		3,569,327,000	3,569,327,000	-	3,569,327,000	-	100.00%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo